

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
MELALUI PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG**

**(Studi Kasus : Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096
K/Pid.Sus/2018)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**OLEH
AMELYA SYUHADA PUTRI**

1920112005

Dosen Pembimbing :

- 1. PROF. DR. H. ELWI DANIL, SH, MH**
- 2. DR. NANI MULYATI, SH, MCL.**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
MELALUI PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096
K/Pid.Sus/2018)**

**Amelya Syuhada Putri, 1920112005, Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104 hlm, 2022**

ABSTRAK

Korban dalam sistem peradilan pidana merupakan subjek yang terlupakan dan dirugikan. Selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Sebagaimana yang terjadi pada kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel. Pada putusan kasasi kasus PT first Travel hakim telah menguatkan putusan pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Putusan tersebut mengakibatkan korban calon jamaah first travel tidak mendapatkan ganti kerugiannya dikarenakan aset first travel dirampas dan dikembalikan kepada negara, padahal negara sama sekali tidak dirugikan dalam kasus tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel tentang bagaimana korban first travel bisa mendapatkan haknya kembali melalui penggabungan gugatan ganti rugi karena KUHAP telah memberikan suatu jalan bagi para korban untuk bisa mendapatkan haknya tersebut pada Pasal 98-101 KUHAP. Penulis tertarik membahas 1) Bagaimanakah pentingnya penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel dalam rangka perlindungan korban? 2) Bagaimanakah putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 ditinjau berdasarkan teori keadilan dan teori kemanfaatan? Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh hasil bahwa : 1) Pentingnya penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT Frst Travel adalah sebagai jalan untuk memberikan perlindungan bagi korban untuk bisa mendapatkan haknya kembali. Meskipun ganti kerugian merupakan ranah hukum perdata namun KUHAP telah memberikan jalan melalui hubungan positif pada Pasal 98 KUHAP yang membuat perkara gugatan ganti rugi dapat digabungkan pada perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan. Alasan tidak dilaksanakannya penggabungan pada kasus first travel ini adalah dikarenakan tidak adanya permintaan dari korban, hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidaktahuan korban dengan adanya Pasal 98 KUHAP tersebut 2) Putusan kasasi dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel ini disebut tidak selaras dengan teori keadilan dan kemanfaatan, hal tersebut dapat dilihat dari sisi korban yang telah dirugikan namun tidak mendapatkan haknya berupa ganti rugi. Tentu putusan kasasi tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban.

Kata kunci : Penggabungan Gugatan Ganti Rugi, Penipuan, Pencucian Uang

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
MELALUI PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096
K/Pid.Sus/2018)**

**Amelya Syuhada Putri, 1920112005, Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 104 pages, 2022**

ABSTRACT

Victims in the criminal justice system are forgotten and disadvantaged subjects. In addition to having suffered losses as a result of the crimes that befell them, both materially, physically and psychologically, victims also have to suffer because unknowingly they are often treated only as a means to achieve legal certainty. As happened in the case of fraud and money laundering by PT First Travel. In the cassation decision in the PT First Travel case, the judge upheld the decision at the first level and at the appellate level. This decision resulted in victims of prospective first travel pilgrims not receiving compensation because the first travel assets were confiscated and returned to the state, even though the state was not harmed at all in this case. Therefore the author is interested in conducting research on cases of fraud and money laundering by PT First Travel about how victims of first travel can get their rights back through a combination of claims for compensation because the Criminal Procedure Code has provided a way for victims to be able to get their rights in Article 98 -101 KUHAP. The author is interested in discussing 1) How important is the combination of claims for compensation in cases of fraud and money laundering at PT First Travel in the context of victim protection? 2) How is the cassation decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 reviewed based on the theory of justice and the theory of expediency? This legal research is normative research using library materials or secondary data. Based on the results of the research that the authors have done, the results show that: 1) The importance of combining claims for compensation in cases of fraud and money laundering at PT Frst Travel is as a way to provide protection for victims so they can get their rights back. Even though compensation is in the realm of civil law, the Criminal Procedure Code has provided a way through a positive relationship in Article 98 of the Criminal Procedure Code which allows cases for claims for compensation to be combined with criminal cases at the same time. The reason for not carrying out the merger in the first travel case was due to the absence of a request from the victim, this could have happened due to the victim's ignorance of the existence of Article 98 of the Criminal Procedure Code. the theory of justice and expediency, this can be seen from the side of the victim who has been harmed but does not get his rights in the form of compensation. Of course the cassation decision did not provide justice and benefits for the victim.

Keywords: Compensation Lawsuit Combination, Fraud, Money Laundering